

Partisipasi Kerja Perempuan Status Janda di Pasar Kerja Jawa Barat

Labor participation of the widows in the West Java labor market

Abdur Rofi

Universitas Gadjah Mada

*Korespondensi penulis: abdurrofi@ugm.ac.id

ABSTRACT

The number of widows has increased in Indonesia, especially in West Java. A widow will face greater demands to meet family needs due to the loss or reduced support in the absence of a husband. This study examines widows in the labor market of West Java province. Specifically, this study will examine whether the widow status factor influences women entering the labor market and its influence on getting a job. This research uses raw data from Sakernas 2020, with a total sample of 29,974 individuals from all districts in West Java. The collected data was processed and analyzed using descriptive statistical analysis and logistic regression to assess the likelihood of widows entering the labor market and being employed. The results of the study show that the status of a widow does not significantly affect the probability of West Java women entering the labor market, but it does have an influence on the probability of being absorbed in the labor market. Non-widowed women are more likely to be employed than widows. Women with widow status primarily work in other service sectors, with menial types of work, with their own employment status (informal), and receive lower wages.

Keywords: labor market, widows, West Java

ABSTRAK

Jumlah perempuan yang berstatus janda mengalami kenaikan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Menjadi janda akan dihadapkan pada tuntutan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena hilang atau berkurangnya dukungan pasca ketiadaan sang suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi perempuan berstatus janda dalam pasar kerja di Provinsi Jawa Barat. Secara khusus penelitian ini akan mengkaji faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perempuan berstatus janda memasuki dan terserap di pasar kerja serta sektor, status, dan jenis pekerjaan yang dimasuki. Penelitian ini menggunakan data mentah Sakernas tahun 2020. Total sampel yang digunakan sebanyak 29.974 orang dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Data yang ada diolah dan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi logistik untuk melihat kemungkinan janda masuk ke pasar kerja dan kemungkinan terserap di pasar kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status janda tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap probabilitas perempuan Jawa Barat masuk pasar kerja namun memberikan pengaruh terhadap probabilitas untuk terserap di pasar kerja. Perempuan bukan janda lebih memiliki kemungkinan diperkerjakan dibandingkan dengan janda. Perempuan yang berstatus janda lebih banyak bekerja di sektor jasa lainnya, dengan jenis pekerjaan kasar, dengan status pekerjaan sendiri (informal), dan dengan upah yang lebih rendah.

Kata kunci: pasar kerja, janda, Jawa Barat



PENDAHULUAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dalam pasar kerja sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 menunjukkan bahwa TPAK laki-laki sebesar 82,41% sementara perempuan 53,14% (BPS 2022b). Bahkan di Provinsi Jawa Barat, kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan lebih tinggi, TPAK laki-laki di Jawa Barat sebesar 81,9%, sementara perempuan hanya 46,8% (BPS, 2021). TPAK menurut jenis kelamin ini relatif tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang lebih rendah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor (Adeyem dkk., 2016; Assaad dkk., 2020; Greenwood dkk., 2016; Ukkas, 2017). Secara garis besar terdapat tiga kategori faktor yang menjelaskan partisipasi perempuan di pasar kerja, yaitu faktor individu dan faktor demografi (usia, pendidikan, status perkawinan), faktor kondisi sosial ekonomi (pendapatan per kapita rumah tangga, jumlah tanggungan, jenis rumah tangga), dan faktor lokasi geografis.

Salah satu faktor individu yang menyebabkan perempuan menarik diri dari pasar kerja adalah status perkawinan. Perempuan yang bekerja kadang-kadang menarik diri dari pasar kerja karena alasan perkawinan dan anak. Studi menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi perempuan dalam pasar kerja menurut umur cenderung akan tinggi pada usia muda, kemudian menurun pada umur 25—35 tahun, dan akan meningkat kembali setelah usia 35 tahun sampai 60 tahun setelah anak-anak mereka dianggap cukup dewasa. Dalam masyarakat tertentu, perempuan yang sudah menikah tidak leluasa masuk pasar kerja karena harus mendapatkan izin suaminya (Adeyem dkk., 2016).

Tidak semua rumah tangga berjalan lancar. Pasangan dapat dipisahkan oleh perceraian atau kematian. Terjadinya Covid-19 dapat meningkatkan potensi seseorang menjadi janda karena kematian pasangan secara mendadak atau terjadinya perceraian akibat dampak Covid-19. Hingga 7 September 2020, terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah

diajukan dan diproses sejak Januari 2020 di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Dari angka tersebut, kasus ajuan perceraian paling banyak diajukan pada Juni dan Juli 2020, masing-masing 12.603 kasus di bulan Juni dan 11.778 kasus di bulan Juli. Pada bulan-bulan sebelumnya, kasus pengajuan cerai ada di kisaran angka 2.000—8.000 kasus (Tristanto, 2020). Data cerai gugat yang diajukan oleh istri pada masa pandemi Covid-19 meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat tertinggi perceraian pada masa pandemi (Judiasih & Salim, 2021). Data BPS menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 447.743 kasus. Jawa Barat menyumbang 98.088 kasus (21,9%), tertinggi dibandingkan provinsi lain, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur, yang pada tahun sebelumnya menduduki kasus perceraian tertinggi di Indonesia. Dari kasus perceraian yang ada di Jawa Barat, sebanyak 75,6% adalah kasus perceraian karena cerai gugat. Alasan utama perempuan mengajukan cerai gugat karena suami dianggap tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar rumah tangga. Jumlah pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan harian rumah tangga dan biaya untuk kebutuhan anak menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Perpisahan karena kematian atau perceraian itu sering kali membuat laki-laki atau perempuan menjadi tidak mudah menjalani kehidupannya. Meskipun demikian, perempuan yang sudah berpisah tidak lebih mudah daripada laki-laki dalam melakukan pernikahan kembali. Hal ini terlihat dari persentase janda yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan duda. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah janda mencapai angka 12—13 % sementara duda hanya berkisar 3—4%. Angka ini relatif stabil dalam 10 tahun terakhir. Sementara perempuan yang menjanda dalam jangka pendek maupun panjang lebih cenderung mengalami tekanan psikologis, kesehatan, dan penilaian diri yang lebih buruk dibandingkan dengan laki-laki (Perkins dkk., 2016).

Status janda dapat menyebabkan subordinasi dan marginalisasi (Rohinah. & Anisah, 2020).

Subordinasi dan marginalisasi ini sering kali bersifat ganda yakni karena sebagai perempuan dan hilangnya status perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian. Hal ini setidaknya terlihat pada janda yang sering mengalami pengucilan sosial dan perampasan ekonomi. Menjadi janda akan dihadapkan pada dua hal, yaitu tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga dan hilangnya dukungan pasca ketiadaan sang suami. Janda sering kali memiliki tanggung jawab untuk merawat anak-anak dengan sumber daya yang terbatas. Situasi tersebut menjadi lebih buruk jika janda yang tidak memiliki akses secara finansial (Fakhria, 2019).

Keputusan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja pada akhirnya merupakan keputusan tentang bagaimana seseorang akan menghabiskan waktu yang dimiliki. Individu dihadapkan pada pilihan untuk menghabiskan waktu mereka untuk kegiatan kesenangan atau menggunakan waktu itu untuk bekerja. Selanjutnya, ketika seseorang memutuskan untuk bekerja, mereka dihadapkan pada pilihan antara produksi rumah tangga/melakukan kegiatan rumah tangga dan bekerja di luar untuk mendapatkan bayaran dalam aktivitas terkait pasar (Ehrenberg & Smith, 2017).

Keputusan anggota rumah tangga untuk bekerja juga dipengaruhi banyak faktor. Status perkawinan menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja. Saat memutuskan apakah akan bekerja dan berapa banyak waktu yang dialokasikan untuk bekerja, seorang perempuan mempertimbangkan upah dan tunjangan nonmoneter terhadap biaya peluang yang hilang untuk kegiatan rumah tangga dan waktu luang serta biaya yang dia dan anggota keluarganya akan dikeluarkan jika dia melakukan pekerjaan di luar rumah (Schaner & Das, 2016).

Stigma dan norma sosial, misalnya yang berkaitan dengan mobilitas perempuan atau jenis pekerjaan apa yang pantas untuk dilakukan perempuan, mungkin sangat penting di negara-negara seperti Indonesia. Saat peran laki-laki dan perempuan di rumah dan di masyarakat sering kali dibedakan dengan jelas. Dalam masyarakat

tradisional, perempuan ditempatkan dalam fungsi reproduksi seperti melahirkan dan kemudian menurunkan peran seperti mengasuh anak dan mendukung suami. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah (Ahdiah, 2013).

Memasuki angkatan kerja atau keterlibatan seseorang dalam pasar kerja (bekerja dan mencari kerja) bukanlah transisi yang mudah bagi kebanyakan janda. Mereka mungkin menghadapi stigma sosial atau menjadi korban gosip yang tidak baik karena bekerja di luar rumah atau tidak mengikuti ekspektasi ritual berkabung. Janda yang mewarisi bisnis keluarga mungkin menghadapi tantangan serupa selain mengalami diskriminasi dari pelanggan, pemasok, dan karyawan, terutama di masyarakat yang menganggap rendah peran perempuan (Reed, 2020). Mendapatkan pinjaman tanpa seorang laki-laki untuk memberikan agunan atas nama mereka adalah perjuangan lain bagi para janda, terutama di beberapa lembaga keuangan formal yang mengharuskan persetujuan laki-laki bagi perempuan yang ingin mendapatkan pinjaman (Rahadiantino & Rini, 2021; Reed, 2020).

Isu janda dalam pasar kerja ini menarik untuk diteliti di Indonesia, khususnya Jawa Barat, karena adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase janda di provinsi ini. Sebagai gambaran, pada tahun 2019, persentase Janda di Jawa Barat adalah sebesar 12,78 % (BPS, 2019), dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 13,05 % (BPS, 2020c). Angka ini tidak memperhitungkan janda yang kemudian memilih untuk menikah lagi.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi ekonomi perempuan berstatus janda di pasar kerja di Provinsi Jawa Barat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji partisipasi dan penyerapan angkatan kerja perempuan berdasarkan perbedaan status perkawinan (janda dan bukan janda) di pasar kerja, serta apakah status janda menjadi faktor yang berpengaruh bagi perempuan untuk masuk pasar kerja atau mendapatkan pekerjaan. Dari hasil penelitian ini akan diperoleh gambaran situasi

ketenagakerjaan janda di pasar kerja dan berguna dalam menyusun kebijakan yang lebih baik, terutama bagi perempuan yang berstatus janda.

METODE

Penelitian ini menggunakan data mentah (*raw data*) Sakernas tahun 2020. Sampel Sakernas yang diolah khusus penduduk perempuan di Jawa Barat yang berumur 15 tahun ke atas. Total sampel yang digunakan adalah sebanyak 29.974 orang, yang dikumpulkan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.

Data mentah Sakernas 2020 tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap TPAK janda di pasar kerja. Untuk melihat partisipasi janda dalam pasar kerja, dilakukan studi komparasi dengan membandingkan perempuan bukan janda dalam di dalam pasar kerja, termasuk karakteristik menurut kelompok umur, pendidikan, dan lokasi (desa-kota). Analisis inferensial digunakan untuk melihat probabilitas janda memasuki pasar kerja atau tidak, dan melihat probabilitas janda untuk dipekerjakan atau tidak. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik (Logit) dengan dua variabel dependen biner untuk dua model: 1) Kemungkinan janda masuk ke dalam angkatan kerja (1 untuk di dalam angkatan kerja dan 0 untuk tidak di dalam angkatan kerja); 2) Kemungkinan janda dipekerjakan (1 untuk dipekerjakan dan 0 untuk tidak dipekerjakan) dari semua sampel perempuan (janda dan bukan janda), dengan model estimasi sebagai berikut:

$$AK = \alpha + \beta \text{status_janda} + \epsilon \quad (1)$$

$$\text{Bekerja} = \alpha + \beta \text{status_janda} + \epsilon \quad (2)$$

Keterangan:

AK = probabilitas masuk angkatan kerja (1= dalam angkatan kerja, 0= bukan angkatan kerja)

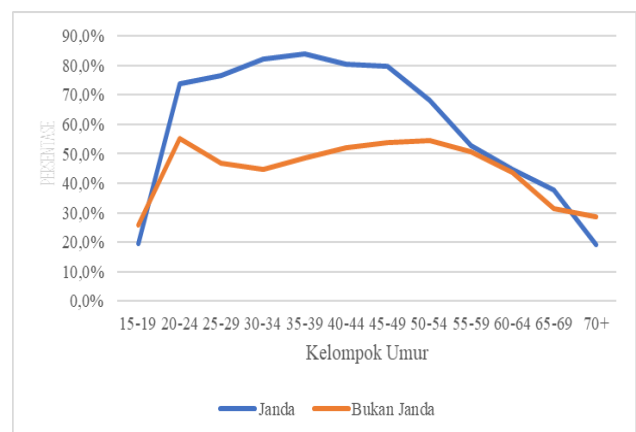
Bekerja = probabilitas dipekerjakan (1= bekerja, 0=tidak bekerja/ menganggur)

$$\text{status_janda} = \text{status} \quad (1= \text{janda}, 0= \text{bukan janda})$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk perempuan usia kerja (penduduk di atas 15 tahun) cukup besar, yaitu tercatat sebanyak 18.559.309 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari perempuan yang berstatus bukan janda (belum kawin dan kawin) sebanyak 15.950.835 jiwa dan 2.608.474 jiwa penduduk berstatus janda. Tidak semua perempuan usia kerja masuk ke dalam pasar kerja. Berbagai faktor memengaruhi keputusan perempuan usia kerja untuk masuk pasar kerja, salah satunya adalah perkawinan (Reed, 2020).

Kondisi ketenagakerjaan janda dan bukan janda ini dapat ditinjau melalui nilai TPAK, sebagai indikator untuk menunjukkan partisipasi ekonomi di pasar kerja. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbandingan nilai TPAK perempuan dengan status janda dan bukan janda (Gambar 1). TPAK perempuan berstatus janda 47,8%, lebih besar dari bukan janda sebesar 46,4%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perempuan dengan status janda lebih besar untuk masuk ke pasar kerja dibandingkan dengan perempuan yang bukan janda. Reed (2020) menyatakan bahwa perempuan dengan status janda akan lebih memiliki tekanan untuk bisa independen secara finansial dibandingkan dengan perempuan yang bukan janda. Kondisi ini tentu akan memaksa perempuan janda untuk masuk ke pasar kerja (Hancioglu & Hartmann, 2014).



Gambar 1. TPAK Janda dan Bukan Janda di Jawa Barat 2020

Sumber data: diolah dari data mentah Sakernas 2020

TPAK janda menurut kelompok umur menunjukkan adanya perbedaan dengan TPAK perempuan bukan janda (Gambar 1). TPAK janda lebih tinggi pada kelompok umur 20—49 tahun dengan nilai TPAK sebesar 70-84%, sementara TPAK perempuan bukan janda cenderung lebih rendah bahkan menurun pada kelompok umur 25—34 tahun. Perbedaan karakteristik ini menunjukkan bahwa perempuan bukan janda pada kelompok umur 25—34 cenderung menarik diri dari pasar kerja, sementara perempuan janda cenderung masuk ke pasar kerja karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Perempuan pekerja sering kali dihadapkan pada dilema pembagian tanggung jawab di tempat kerja dan mengurus tugas rumah tangga selama menikah dan memiliki anak (Amin dkk., 2017). Peran suami adalah salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi perempuan atau istri di pasar kerja, terutama ketika sudah memiliki anak. Dalam perspektif yang umum di Indonesia, sebagai kepala rumah tangga, suami diberikan kewenangan untuk memutuskan urusan keluarga. Salah satu penyebab disparitas partisipasi laki-laki dan perempuan adalah perlunya perempuan yang sudah menikah untuk mendapatkan izin suami ketika hendak bekerja (Agusta & Ghuzini, 2020).

Studi ini juga menemukan bahwa TPAK janda di Jawa Barat yang tinggi terjadi pada usia yang sangat belia (15—24 tahun). Penelitian yang dilakukan oleh Grijns and Horii (2018) menyatakan bahwa terdapat cukup banyak kasus pernikahan anak dengan usia belia yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Pernikahan tersebut dilakukan secara legal maupun ilegal (Grijns & Horii, 2018). Kondisi inilah yang kemungkinan menyebabkan cukup tingginya TPAK pada kelompok umur 15 hingga 24 tahun terutama pada kelompok janda.

Karakteristik angkatan kerja perempuan janda dan bukan janda dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu lokasi (desa-kota), jumlah anak, dan tingkat pendidikan (Tabel 1). Dilihat dari tempat tinggal, TPAK perempuan menunjukkan adanya perbedaan pada karakteristik lokasi tempat tinggal, TPAK janda lebih tinggi di

perkotaan, sementara TPAK bukan janda lebih tinggi di pedesaan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam dkk. (2018) tentang pasar tenaga kerja perempuan di TPAK di Indonesia yang menunjukkan nilai TPAK perempuan berstatus janda lebih tinggi di pedesaan. Temuan yang berbeda ini menarik untuk dikaji lebih jauh, apakah perbedaan ini disebabkan lokasi Jawa Barat yang lebih dekat dengan Jakarta atau ada faktor lain seperti etnis dan budaya Sunda yang berbeda dengan pola yang terjadi secara nasional.

Tabel 1. TPAK Perempuan Menurut Karakteristik Status Kawin dan Sosial-Ekonomi

Karakteristik	TPAK Janda (%)	TPAK Bukan Janda (%)
Lokasi		
Kota	48,2	46,0
Desa	46,5	48,0
Jumlah ART		
1—2	47,3	50,7
3—4	52,4	45,9
5—6	39,3	45,0
7+	46,7	47,5
Tingkat Pendidikan		
TT SD	37,7	37,7
SD	46,9	46,9
SMP	59,5	60,0
SMA	59,8	59,8
PT	62,9	63,0

Sumber: Diolah dari data mentah Sakernas 2020

Karakteristik lain yang membedakan TPAK janda dan bukan janda adalah terkait dengan banyaknya anggota rumah tangga. Janda dengan anak dan janda yang tidak memiliki anak akan memiliki beban yang berbeda secara ekonomi dan sosial. Begitu juga janda yang ditanggung oleh keluarga besar akan berbeda secara ekonomi dan sosial dengan janda yang tidak ditanggung oleh keluarga besar. Studi ini menemukan bahwa TPAK janda lebih tinggi pada rumah tangga dengan anggota 3—4 jiwa. Sementara TPAK bukan janda lebih tinggi dengan pada rumah tangga dengan jumlah anggota 1—2 jiwa. TPAK baik janda maupun bukan janda menurun sampai jumlah anggota rumah tangganya 6, dan kemudian naik kembali dengan jumlah anggota rumah tangga lebih dari 7 jiwa.

Perbedaan pola TPAK antara janda dan bukan

janda jika dilihat dari jumlah anak ini menarik terutama jika dikaitkan dengan beban ekonomi dan rasa aman. Semakin banyak jumlah anak, maka beban ekonomi yang harus ditanggung sendiri semakin besar sehingga mendorong perempuan berstatus janda untuk berpartisipasi di pasar kerja (bekerja dan mencari kerja). Partisipasi perempuan juga akan meningkat jika pasangannya menganggur (Finegan & Margo, 1994). Sebaliknya, tingkat upah yang tinggi dari pasangannya memiliki efek negatif terhadap partisipasi perempuan dalam pasar kerja (Kiani, 2021). Selanjut, penelitian Youngblut dkk. (2000) dan Alam dkk. (2018) menemukan perempuan masuk ke pasar kerja karena adanya rasa aman untuk meninggalkan anak di rumah bersama dengan anggota keluarga lainnya yang lebih tua. Selain itu, adan pengaruh biaya untuk menjaga anak terhadap keterlibatan perempuan di pasar kerja baik dalam bentuk *childcare* ataupun *babysitter*. Pilihan dan kemampuan finansial untuk memiliki pengasuh anak akan

mendorong perempuan untuk masuk ke pasar kerja (Goyette, 2018).

Karakteristik TPAK janda dan bukan menurut tingkat pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar TPAK janda dan bukan janda. Tidak ada pola khusus perbedaan antara TPAK janda dan bukan janda. Peningkatan pendidikan telah mendorong lebih banyak perempuan untuk memasuki angkatan kerja. Meskipun demikian, peningkatan peluang pasar tenaga kerja juga telah mendorong peningkatan pendidikan perempuan (Heath & Jayachandran, 2017). Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam peningkatan kondisi ketenagakerjaan, kemudian akan berimplikasi terhadap kondisi ekonomi. Semakin baik investasi yang dilakukan oleh seorang individu dalam pendidikan, maka akan semakin baik kondisi ekonomi yang tercipta (Gillies, 2017).

Tabel 2. Hasil Output Regresi Logistik Angkatan Kerja dan Status Janda

Variabel	Odd Ratio	Std. err	z	P> z	[95% conf. interval]	
Janda	1,047	0.034	1.42	0,157	0.982	1.116
_cons	0,895	0.011	-8,86	0,000	0,873	0,917
Number of Obs	29.974					
LR Chi ² (1)	2,01					
Prob>chi ²	0,159					
Pseudo R ²	0,000					
Log Likelihood	-20.734, 77					

Sumber: Diolah dari data mentah Sakernas 2020

Data pada pembahasan awal menunjukkan bahwa TPAK janda lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK bukan janda. Analisis lebih lanjut ingin mengetahui apakah ada pengaruh status janda dalam memasuki pasar kerja (Tabel 2).

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis data menggunakan regresi logistik yang memperlihatkan bahwa dugaan adanya pengaruh status janda dalam memasuki pasar kerja adalah ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai z sebesar 1,42 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,157. Nilai signifikansi ini lebih besar dibandingkan dengan 0,005 sehingga dapat dikatakan bahwa status janda tidak mampu memberikan efek pada probabilitas untuk masuk ke pasar kerja, meskipun terdapat perbedaan karakteristik TPAK janda dan bukan janda jika dilihat dari

status tempat tinggal dan jumlah anggota rumah tangga.

Janda yang Bekerja dan Menganggur

Penduduk perempuan yang masuk ke dalam angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan mencari kerja/menganggur. Tingkat penyerapan perempuan berstatus janda di pasar kerja (bekerja) lebih banyak dibandingkan dengan bukan janda (Tabel 3). Hal ini terlihat dari nilai persentase perempuan janda yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan janda. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) janda lebih rendah dibandingkan dengan TPT kelompok bukan janda. Tercatat TPT janda 9,7% sementara TPT perempuan bukan janda mencapai 12,4%. Diduga, kelompok janda yang memilih masuk ke pasar

kerja memiliki tanggungan dan risiko lebih terhadap keadaan ekonomi rumah tangga dibandingkan dengan bukan janda, sehingga mereka tidak bisa memilih pekerjaan yang diinginkan. Rumah tangga yang ditanggung oleh perempuan janda akan lebih berisiko dan rentan terkena dampak ketidakstabilan ekonomi (Wu & Eamon, 2011)

Hal tersebut menyebabkan rumah tangga janda memerlukan adanya kegiatan yang bisa menghasilkan pemasukan untuk bisa bertahan hidup untuk dirinya sendiri dan untuk rumah tangganya sehingga janda tidak memiliki kemewahan untuk memilih jenis pekerjaan yang diinginkan. Hal tersebut diduga merupakan salah satu faktor mengapa di Jawa Barat, nilai TPT kelompok janda lebih rendah dibandingkan kelompok perempuan bukan janda. Berbeda dengan bukan janda, perempuan berstatus janda tidak memerlukan persetujuan suami atau kepala keluarga untuk masuk pasar kerja dan menentukan jenis pekerjaan yang akan mereka ambil.

Profil janda dan bukan janda yang bekerja dan menganggur secara detail terdapat pada Tabel 3. Karakteristik TPT janda terlihat lebih tinggi di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan, namun sebaliknya TPT bukan janda lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Hal ini diduga dikarenakan kesempatan janda bekerja di pedesaan lebih banyak di sektor pertanian. Selain itu, TPT janda sangat tinggi pada mereka yang memiliki anggota rumah tangga sebanyak 5 hingga 6 jiwa, dan memiliki pendidikan tertinggi yaitu Tamat SMA/Sederajat. Sedangkan karakteristik pengangguran kelompok bukan janda didominasi oleh mereka memiliki anggota rumah tangga berjumlah di atas 7 jiwa, dan memiliki klasifikasi pendidikan tertinggi Tamat SMA/Sederajat. Berdasarkan temuan ini tergambar adanya perbedaan pola pada karakteristik lokasi tempat tinggal dan juga jumlah anggota rumah tangga pengangguran perempuan janda dan bukan janda. Sedangkan pada karakteristik tingkat pendidikan, tidak ada perbedaan tingkat pengangguran janda dan bukan janda yang besar.

Tabel 3. Angkatan Kerja Perempuan Menurut Status dan Karakteristik Sosial-Ekonomi (%)

Karakteristik	Janda bekerja	TPT Janda	Bukan janda bekerja	TPT Bukan janda
Lokasi				
Kota	90,5	9,5	87,2	12,8
Desa	89,8	10,2	88,7	11,3
Jumlah ART				
1—2	90,9	9,1	91,8	8,2
3—4	87,2	12,8	88,2	11,8
5—6	72,6	27,4	84,0	16,0
7+	95,0	5,0	82,1	17,9
Tingkat Pendidikan				
TT SD	93,0	7,0	94,3	5,7
SD	91,2	8,8	93,3	6,7
SMP	85,9	14,1	88,5	11,5
SMA	85,2	14,8	80,7	19,3
PT	96,1	3,9	87,2	12,8
Total	90,3	9,7	87,6	12,4

Sumber: Diolah dari data mentah Sakernas 2020

Persamaan pola pada karakteristik tersebut menunjukkan bahwa perempuan baik janda maupun bukan janda tidak mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai jika memiliki jumlah anak yang cukup besar, terutama pada janda dengan anggota rumah tangga antara 5—6 orang. Hal ini tidak mudah bagi mereka untuk membagi peran dan pembagian domestik dan publik, dan

kesesuaian jam kerja yang diharapkan. Dalam kasus ini, perempuan untuk tetap tinggal di rumah dengan rumah tangga yang memiliki anggota cukup banyak. Temuan ini relatif tidak berbeda dengan beberapa daerah lain di Indonesia bahkan di Asia (Adeyem dkk., 2016) Adapun pada karakteristik pendidikan tertinggi terdapat kesamaan pola, yaitu nilai TPT tinggi

pada klasifikasi Tamat SMA/Sederajat. Hal ini sejalan dengan penelitian lain yang menemukan bahwa penduduk tamatan SMA/Sederajat akan lebih memiliki peluang yang tinggi untuk menjadi pengangguran Wardhana dkk., 2019). Hal ini dikarenakan adanya persaingan pasar yang ketat dan juga ekspektasi akan pekerjaan dan gaji yang layak, tidak mudah diperoleh di pasar kerja. Kondisi ini tidak hanya berlaku bagi tenaga kerja perempuan, melainkan juga pada laki-laki (Abrar dkk., 2019)

Sektor, Jenis, dan Status Pekerjaan Janda

Lapangan pekerjaan diciptakan untuk bisa menyerap ketersediaan tenaga kerja yang ada di suatu daerah. Setiap sektor di berbagai lapangan usaha memiliki kualifikasi khusus. Sering kali kualifikasi khusus ini menimbulkan segmentasi pasar kerja termasuk di dalamnya adanya segmentasi menurut jenis kelamin. Pekerja di sektor konstruksi misalnya, pekerja perempuan akan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pekerja laki-laki (Pignatti, 2010) Studi ini juga menemukan kecenderungan yang sama (Tabel 4). Persentase jumlah pekerja pada kategori pertambangan dan penggalian memiliki nilai terkecil pada kelompok janda (0,2%) dan pada bukan janda (0,5%).

Pekerja janda dan bukan janda banyak terserap di sektor perdagangan besar dan eceran, masing-masing 28,8% dan 29,0%. Banyaknya jenis klasifikasi pedagang dan minimnya kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di sektor perdagangan, khususnya perdagangan kecil, membuat jumlah penduduk yang bekerja termasuk dalam klasifikasi sektor perdagangan menjadi paling banyak dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan dokumen Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, sektor perdagangan di dalamnya mencakup berbagai jenis perdagangan, baik itu sifatnya skala besar hingga kepada skala kecil bahkan pada kaki lima (BPS, 2020a). Sektor perdagangan dapat bersifat formal dan juga informal, serta tentunya dapat dikatakan sebagai salah satu sektor yang mudah untuk dimasuki oleh berbagai kalangan.

Selain perdagangan, sektor lain yang cukup besar dimasuki oleh janda adalah sektor industri

pengolahan (14,20%). Sektor ini juga banyak menyerap perempuan bukan janda (20,40%). Sektor pertanian (19,70%), penyedia akomodasi dan makanan (12,20%), dan penyedia jasa lainnya (15,80%) juga menjadi sektor yang banyak menyerap tenaga kerja janda. Sektor-sektor banyak menyerap janda karena sektor tersebut mudah dimasuki perempuan janda karena relatif tidak banyak membutuhkan keahlian khusus dan sementara pekerjaan sebagai penyedia akomodasi dan makanan dianggap sebagai kepanjangan dari pekerjaan domestik (Nasikun, 1990).

Pekerja perempuan bukan janda juga memasuki sektor-sektor tersebut dengan persentase yang relatif sama. Sektor yang sedikit berbeda antara janda dan bukan janda adalah di sektor pendidikan dan jasa lainnya. Janda yang bekerja di sektor pendidikan hanya 3,32%, sedangkan bukan janda mencapai 7,20%. Sementara itu, janda yang bekerja di sektor jasa lainnya mencapai 15,80%, sedangkan yang bukan janda hanya 7,30%. Perbedaan ini menarik karena jumlah janda yang bekerja di sektor jasa lainnya cukup besar. Sektor jasa lainnya termasuk dalam kegiatan sosial, jasa perorangan, atau bekerja di lembaga sosial. Besarnya perempuan janda masuk sektor jasa lainnya karena selain mudah dimasuki, juga biasanya karena tiadanya alternatif pekerjaan lain yang tersedia.

Selain dilihat dari sektor pekerjaan, pekerja janda juga dapat dilihat dari jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan janda adalah tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan, dengan persentase sebesar 35,70%. Angka yang mirip juga ditemukan untuk perempuan yang bukan janda, mayoritas mereka juga bekerja di jenis pekerjaan tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan, yakni sebanyak 33,60%. Jenis pekerjaan yang membedakan janda dan bukan janda adalah pada tenaga profesional, persentase bukan janda yang bekerja di jenis pekerjaan profesional lebih banyak (9,90%) dibandingkan dengan janda (5,1%).

Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa sebagian janda yang masuk ke pasar kerja tidak memiliki pilihan untuk memilih pekerjaan yang diinginkan. Hal ini terlihat bahwa banyaknya pekerja janda yang bekerja berusaha sendiri dan

dibantu dengan buruh tidak tetap, yang merupakan bagian dari sektor informal. Pilihan sektor pekerjaan ini menunjukkan bahwa mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri mereka atau rumah tangganya. Kondisi perekonomian seorang perempuan dapat berubah setelah dan sebelum menikah ataupun menjadi janda. Perubahan tersebut terkadang mengharuskan mereka untuk masuk ataupun keluar dari klasifikasi penduduk angkatan kerja.

Gambaran tersebut akan menjadi lebih jelas jika melihat status pekerjaan yang dimiliki oleh

pekerja janda. Mayoritas pekerja janda bekerja dengan status pekerjaan bekerja sendiri yaitu sebanyak 36,10%. Sementara pekerja bukan janda mayoritas bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan/pegawai, yakni sebanyak 39,40%. Selain bekerja sendiri, sebagian janda bekerja dengan dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga (14,30%), dan bekerja di sektor pertanian (10,00%). Sementara pekerja bukan janda, selain sebagai buruh/karyawan/pegawai, mereka bekerja sebagai pekerja keluarga/dibayar, yakni sebanyak 21,6%.

Tabel 4. Penyerapan Pekerja Perempuan Menurut Sektor, Status, dan Jenis Pekerjaan

Sektor pekerjaan	Janda (%)	Bukan Janda (%)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,7	14,5
2. Pertambangan dan Penggalian	0,1	0,1
3. Industri Pengolahan	14,2	20,4
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,2	0,4
6. Konstruksi	0,2	0,5
7. Perdagangan Besar dan Eceran	28,8	29,0
8. Transportasi dan Pergudangan	0,4	0,7
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,2	11,6
10. Informasi dan Komunikasi	0,3	1,0
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,4	1,8
12. Real Estat	1,0	0,2
13. Jasa Perusahaan	1,3	1,0
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,8	1,7
15. Jasa Pendidikan	3,3	7,2
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,2	2,7
17. Jasa Lainnya	15,8	7,3
Total	100,0	100,0
Status pekerjaan		
1. Berusaha sendiri	36,1	19,6
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	14,3	11,4
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	2,6	1,2
4. Buruh/karyawan/pegawai	26,2	39,4
5. Pekerja bebas di pertanian	10,0	3,9
6. Pekerja bebas di non-pertanian	6,1	2,9
7. Pekerja keluarga/tidak dibayar	4,7	21,6
Total	100,0	100,0
Jenis Pekerjaan		
1. Tenaga Profesional, Teknisi dan Tenaga Lain	5,1	9,9

Sektor pekerjaan	Janda (%)	Bukan Janda (%)
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	0,3	0,8
3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha dan Tenaga lain	2,6	7,4
4. Tenaga Usaha Penjualan	35,7	33,6
5. Tenaga Usaha Jasa	18,0	9,9
6. Tenaga Usaha Tani, Kebun, Ternak, Ikan, Hutan dan Perburuan	19,1	14,3
7. Tenaga Produksi Operator Alat Angkutan dan Pekerja Kasar	19,1	23,9
8. Lainnya	0,1	0,2
Total	100,0	100,0

Sumber: Diolah dari data mentah Sakernas 2020

Temuan terkait dengan status pekerjaan ini menegaskan perbedaan karakteristik status pekerjaan yang dilakukan pekerja janda dan bukan janda. Janda yang bekerja sendiri atau bekerja dibantu pekerja tidak tetap/tidak dibayar serta pekerja bebas pertanian lebih besar menunjukkan mereka lebih banyak terserap pada pekerjaan informal yang tidak membutuhkan keahlian dan modal besar. Hal ini juga mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa mereka masuk ke pasar kerja setelah mengalami perceraian, baik karena cerai hidup atau cerai mati. Ketiadaan sumber penghidupan setelah sendiri mendorong janda untuk masuk ke pasar kerja karena tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pilihan pekerjaan sebagai pekerja sendiri atau

dibantu pekerja tidak tetap atau tidak dibayar (yang termasuk dalam sektor informal) ini menandakan situasi yang tidak mudah antara untuk menambah penghasilan dan untuk tetap menyeimbangkan peran sebagai ibu rumah tangga (Sabariman, 2019). Pilihan status pekerja sendiri (informal) ini juga sebagai alternatif kemudahan dalam bekerja terutama pada usaha skala kecil cenderung lebih fleksibel dibandingkan dengan sektor lainnya.

Data pada pembahasan awal menunjukkan bahwa tingkat partisipasi janda yang bekerja adalah lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang bukan janda. Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh status janda dalam probabilitas untuk bekerja atau tidak dengan menggunakan analisis regresi logistik.

Tabel 5. Hasil Output Regresi Logistik Bekerja dan Status Janda

Variabel	Odd Ratio	Std. err	z	P> z	[95% conf. interval]	
Janda	1,27	0.094	2,52	0,012	1,045	1.417
_cons	7.541	0.214	71,34	0,000	7,134	7,971
Number of Obs	14.207					
LR Chi ² (1)	6,60					
Prob>chi ²	0,0102					
Pseudo R ²	0,001					
Log Likelihood	-5.044,28					

Sumber: Diolah dari data mentah Sakernas, 2020

Hasil analisis data pengaruh status janda dengan probabilitas untuk bekerja dengan menggunakan regresi logistik dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa dugaan adanya pengaruh status janda untuk probabilitas pekerja dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai z sebesar 2,52 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012. Nilai signifikansi lebih rendah

dibandingkan dengan 0,005. Hasil analisis regresi logistik ini dapat dikatakan bahwa status janda mampu memberikan probabilitas perempuan janda untuk bekerja.

Nilai Pseudo R² sebesar 0,007 yang berarti bahwa pengaruh faktor status janda yang masuk dalam persamaan regresi logistik terhadap kejadian bekerja adalah sebesar 0,7%. Artinya, selain

faktor janda, ada faktor sosial-ekonomi lain yang berkontribusi bagi perempuan untuk diterima pada sebuah pekerjaan. Nilai *Odd Ratio* dari status janda terhadap peluang bekerja sebesar 1,21. Hal ini berarti bahwa perempuan dengan status janda akan memiliki peluang untuk bekerja 1,21 kali lipat dibandingkan yang perempuan yang bukan janda.

Melihat karakteristik lapangan, jenis, dan status pekerjaan yang diambil oleh janda menunjukkan bahwa janda akan cenderung untuk menerima pekerjaan dibandingkan bukan janda. Artinya, perempuan janda lebih sedikit pertimbangan untuk mengambil pekerjaan yang ada. Selain pertimbangan kebutuhan ekonomi, faktor pekerjaan dan pertimbangan pasangan tidak menjadi faktor yang memengaruhi pilihan bagi janda. Sebaliknya, hasil ini menunjukkan bahwa perempuan bukan janda tidak bisa mengambil semua pekerjaan yang ada dengan beberapa alasan yaitu mereka memilih untuk menganggur karena masih ada yang menopang ekonominya atau mereka menunggu pekerjaan yang diinginkan, termasuk sesuai dengan pertimbangan pasangannya.

Argumen bahwa janda cenderung untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka ini adalah diperkuat dengan data upah. Berdasarkan olahan data Sakernas Agustus 2020, diketahui bahwa penduduk perempuan di Jawa Barat memiliki rata-rata gaji/upah sebesar Rp 1.978.501 per bulan. Studi ini menemukan bahwa rata-rata upah yang diperoleh penduduk janda di Jawa Barat adalah Rp 1.605.628 per bulan. Sedangkan pada penduduk bekerja bukan janda, rata-rata upah yang diperoleh adalah sebesar Rp 2.061.814 per bulan.

Temuan ini menunjukkan bahwa rata-rata upah pekerja perempuan kelompok janda cenderung lebih rendah pada penduduk bekerja kelompok bukan janda. Pekerja janda cenderung menerima upah yang lebih rendah umumnya karena desakan ekonomi setelah ketiadaan pasangannya. Selain itu perempuan yang berstatus janda terutama yang tidak bekerja ketika masih ada pasangannya memiliki modal manusia yang lebih rendah untuk bisa masuk ke pasar kerja yang sesuai karena kurangnya pengalaman kerja

dibandingkan dengan perempuan yang bukan janda (Damaske dkk., 2017)

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan ini memberikan gambaran bahwa TPAK janda sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK bukan janda. Namun demikian, hasil analisis regresi logistik menunjukkan dua hal yang menarik terkait probabilitas masuk pasar kerja dan probabilitas dipekerjakan.

Pertama, status janda tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap probabilitas perempuan Jawa Barat masuk pasar kerja dibandingkan dengan perempuan bukan janda. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan karakteristik TPAK janda dan bukan janda di Jawa Barat dari tempat tinggal dan umur. Secara umum, TPAK Jawa Barat lebih besar pada kelompok umur 25—49 tahun. Sementara pada kelompok umur yang sama, perempuan bukan janda cenderung menarik diri dari pasar kerja. Karakteristik lain adalah TPAK janda lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan, sementara disisi lain, TPAK bukan janda lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Sementara karakteristik pendidikan dan jumlah anggota rumah tangga relatif tidak ada perbedaan antara TPAK janda dan bukan janda.

Kedua, meskipun tidak ada pengaruh status janda bagi perempuan dalam memasuki pasar kerja, hal ini berbeda dengan pengaruh status janda untuk perempuan dapat dipekerjakan atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perempuan dengan status janda memiliki peluang terserap di pasar kerja lebih besar dibandingkan dengan perempuan bukan janda. Status janda menyebabkan ketiadaan dukungan terutama secara finansial dari pasangannya, dan adanya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya cenderung membuat janda menerima pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka. Hal ini berbeda dengan perempuan yang bukan janda yang tidak hanya adanya dukungan keuangan dari pasangannya, juga masih mempertimbangkan banyak faktor seperti keluarga dan pasangan untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan. Hal ini terlihat dari

sektor pekerjaan janda yang lebih banyak di sektor jasa lainnya, dengan jenis pekerjaan usaha jasa penjualan dan pekerjaan kasar, dan dengan status pekerjaan sendiri atau pekerjaan yang dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa meskipun tidak ada perbedaan status janda di dalam memasuki pasar kerja, namun ada kecenderungan bahwa janda cenderung menerima pekerjaan yang ada untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya. Janda cenderung bekerja di sektor jasa lainnya, pada jenis pekerjaan usaha penjualan pekerjaan kasar, dan dengan status pekerjaan sendiri. Selain itu janda memiliki rata-rata upah yang lebih rendah. Gambaran ini menunjukkan bahwa pekerja janda dihadapkan pada situasi yang tidak mudah, cenderung tidak ada jaminan sosial, dan cenderung menerima pekerjaan apa saja untuk kelangsungan hidup mereka. Upaya untuk memperbaiki pekerja janda perlu dilakukan dengan memberikan akses untuk pekerjaan yang lebih baik, termasuk di dalamnya memberikan jaminan perlindungan sosial terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Fakultas Geografi yang memberikan hibah penelitian mandiri yang didanai dari dana masyarakat. Terima kasih juga disampaikan kepada Saudara Sadewa yang telah membantu dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada BPS yang memberikan akses untuk mengolah raw data Sekernas 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M., Amalia, N., & Handoyo, R. D. (2019). Karakteristik dan peluang pengangguran usia muda di Provinsi Aceh dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(2), 157–169. <https://jkjournal.com/index.php/menu/article/view/23/28>
- Adeyem, O. E., Odusina, K. E., & Akintoye, A. E. (2016). Religion and labour force participation in Nigeria: Is there any inequality among women? *African Journal of Reproductive Health*, 20(3), 75–84. <https://doi.org/10.29063/ajrh2016/v20i3.12>
- Agusta, M. R., & Ghuzini, D. (2020). Employment condition, the effects of husband's occupation, and education on participation of married women in the Indonesian labor market. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(2), 26–79. <https://doi.org/10.14203/JEP.28.2.2020.%25p>
- Ahdiah, I. (2013). Peran-peran perempuan dalam masyarakat. *ACADEMICA*, 5(2), 1085–1092.
- Alam, I. M., Amin, S., & McCormick, K. (2018). The effect of religion on women's labor force participation rates in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 23(1), 31–50. <https://doi.org/10.1080/13547860.2017.1351791>
- Amin, S. M., Rameli, M. F. P., Othman, A., Hasan, Z. A., & Ibrahim, K. (2017). Decision to work by educated married women. *Advanced Science Letters*, 23(8), 7702–7705. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.9557>
- Assaad, R., Hendy, R., Lassassi, M., & Yassin, S. (2020). *Explaining the MENA paradox: Rising educational attainment yet stagnant female labor force participation. Demographic Research*. <https://doi.org/10.4054/DEMRES.2020.43.28>
- BPS. (2019). *Statistik kesejahteraan rakyat 2019*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/22/1dfd4ad6cb598cd011b500f7/statistik-kesejahteraan-rakyat-2019.html>
- BPS. (2020a). *KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020*. Badan Pusat Statistik. KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 2020

- BPS. (2020b). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2020*. BPS-Statistik Indonesia.
- BPS. (2020c). *Statistik kesejahteraan rakyat 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2020/1/23/8838aec3d69e019d5fce6779/statistik-kesejahteraan-rakyat-2020.html>
- BPS. (2021). *Keadaan angkatan kerja di Jawa Barat Agustus 2020*. Badan Pusat Statistik. <https://jabar.bps.go.id/publication/2021/03/08/df12095f547aa103a3d6df77/keadaan-angkatan-kerja-di-provinsi-jawa-barat-agustus-2020.html>
- Damaske, S., Bratter, J. L., & Frech, A. (2017). Single mother families and employment, race, and poverty in changing economic times. *Social Science Research*, 62, 120–133. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2016.08.008>
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. (2017). *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315101798>
- Fakhria, S. (2019). Cerai gugat dan implikasinya terhadap hak-hak finansial perempuan. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 1(1), 91-119. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648>
- Finegan, T. A., & Margo, R. A. (1994). Work relief and the labor force participation of married women in 1940. *The Journal of Economic History*, 54(1), 64–84. <https://doi.org/10.1017/S0022050700013991>
- Gillies, D. (2017). Human capital theory in education. *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, 1–5. <https://doi.org/10.1007/978-981-287-532-7>
- Goyette, R. J. (2018). *The cost of child care on female labor force participation*. TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. University of Tennessee. https://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3212&context=utk_chanhonoproj
- Greenwood, J., Guner, N., Kocharkov, G., & Santos, C. (2016). Technology and the changing family: A unified model of marriage, divorce, educational attainment, and married female labor-force participation. *American Economic Macroeconomics*, 8(1), 1–41. <https://doi.org/10.1257/mac.20130156>
- Grijns, M., & Horii, H. (2018). Child marriage in a village in West Java (Indonesia): Compromises between legal obligations and religious concerns. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), 453–466. <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>
- Hancioglu, M., & Hartmann, B. (2014). What makes single mothers expand or reduce employment? *Journal of Family and Economic Issues*, 35(1), 27–39. <https://doi.org/10.1007/s10834-013-9355-2>
- Heath, R., & Jayachandran, S. (2017). *The causes and consequences of increased female education and labor force participation in developing countries*. NBER Working Paper Series 22766. <https://doi.org/10.3386/w22766>
- Judiasih, S. D., & Salim, E. F. (2021). Dampak pandemi COVID-19 terhadap perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. *Veritas et Justitia*, 7(2), 506–528. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4328>
- Kiani, A. Q. (2021). Determinants of Female Labor Force Participation. *ASEAN Marketing Journal*, 1(2), 117–124. <https://doi.org/10.21002/amj.v1i2.1986>
- Nasikun. (1990). Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan: Teori dan implikasi kebijakan. *Populasi*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.22146/jp.10685>
- Perkins, J. M., Lee, H.-Y., James, K. S., Oh, J., Krishna, A., Heo, J., Lee, J.-K., & Subramanian, S. V. (2016). Marital status, widowhood duration, gender and health

- outcomes: a cross-sectional study among older adults in India. *BMC Public Health*, *16*(1), 1032. <https://doi.org/10.1186/s12889-016-3682-9>
- Pignatti, N. (2010). *Labor market segmentation and the gender wage gap in Ukraine*. ESCIRRU Working Papers, 17. <https://econpapers.repec.org/paper/diwdi/wesc/diwesc17.htm>
- Rahadiantino, L., & Rini, A. N. (2021). Women access and awareness of financial inclusion in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *19*(1), 39–50. <https://doi.org/10.29259/jep.v19i1.12467>
- Reed, M. N. (2020). The labor force participation of Indian women before and after widowhood. *Demographic Research*, *43*(2), 673–706.
- Rohinah., & Anisah, N. (2020). Solidaritas janda: pemberdayaan perempuan di PJJJ armalah Yogyakarta. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, *2*, 157–171. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.19.2.157-171>
- Sabariman, H. (2019). Perempuan pekerja (status dan peran pekerja perempuan penjaga warung makan kurnia). *Jurnal Analisa Sosiologi*, *8*(2), 162–175. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/34084/27707>
- Schaner, S., & Das, S. (2016). *Female labor force participation in Asia: Indonesia country study*. ADB Economics Working Paper Series, 474. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2737842>
- Tristanto, A. (2020). Perceraian di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif ilmu sosial. *Sosio Informa*, *6*(3), 292–304. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>
- Ukkas, I. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja industri kecil Kota Palopo. *Kelola*, *2*(2), 187–200. <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.440>
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Ibrahim, Y. F. (2019). Pengangguran usia muda di Jawa barat (menggunakan data sakernas). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, *53*(9), 1049–1062. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wu, C.-F., & Eamon, M. K. (2011). Patterns and correlates of involuntary unemployment and underemployment in single-mother families. *Children and Youth Services Review*, *33*(6), 820–828. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.12.003>
- Youngblut, J. M., Brady, N. R., Brooten, D., & Thomas, D. J. (2000). Factors influencing single mother's employment status. *Health Care for Women International*, *21*(2), 125–136. <https://doi.org/10.1080/073993300245357>